

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur



Oleh :

NANDA HANTARA
NPM. 0671010120

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT serta yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul :“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBYEK JAMINANNYA MUSNAH “.

Penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian dalam guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H, M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno, S.H, M.Hum selaku Wakil Dekan I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Drs Gendut Sukarno M.S selaku Wakil Dekan II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, S. H, M Hum selaku Sesprogdi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pembuatan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Bagian Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Dedy Purwandiono selaku Manager Mikro PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Surabaya Rungkut SIER.
9. Kedua orang tua dan Mertua yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini.
10. Siti Cholifa istri tercinta yang selalu menemani dan memberi dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
11. Teman-teman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Surabaya Rungkut SIER yang ikut membantu dan berpartisipasi untuk menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2006 dan seluruh Mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan didalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis mengharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Desember 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka.....	7
1.6 Metode Penelitian.....	27

BAB II	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH...	
	30
2.1	Perjanjian Kredit Jaminan	30
2.2	Sanksi Debitur Jika Wanprestasi	31
2.3	Perlindungan Hukum Bank Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Musnah	33
BAB III	UPAYA HUKUM DARI BANK YANG DIRUGIKAN OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH.....	36
3.1	Non Litigasi	36
3.2	Litigasi	51
3.3	Upaya Bank Untuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-lembaga Hukum	52
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran.....	54

DAFTAR PUSAKA.....	56
--------------------	----

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Nanda Hantara
NPM : 0671010120
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 23 Desember 1984
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR
DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek hukum dalam perkreditan pada Bank untuk menjamin kepastian hukum dalam menjaminkan benda-benda bergerak yang bendanya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, khususnya dalam perjanjian Jaminan Fidusia barang-barang jaminan atau objek jaminannya musnah

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah-kaidah dari peraturan perundangan. Sumber data diperoleh dari literature-literatur dan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian hutang piutang atau juga disebut dengan perjanjian kredit, Bank selaku kreditur mewajibkan barang-barang jaminan atau objek jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia oleh debitur harus diasuransikan pada perusahaan Asuransi yang ditunjuk oleh bank.

Bank selaku kreditur memberikan kredit kepada debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Fidusia harus mampu memahami seluk beluk aspek-aspek hukum yang dipahami dengan sempurna.

Kata kunci :Perjanjian Kredit, Jaminan Fidusia, Asuransi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengertian hutang dalam kamus bahasa indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu “hutang” yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan kata “piutang” mempunyai arti uang yang dipinjamkan dan atau dapat ditagih dari orang lain.¹

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab Undang-Undang hukum perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) pasal 1754 yang berbunyi :

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.”

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. Pertama adalah dalam bentuk gadai, kedua adalah dalam bentuk hipotek yang telah dirubah kedalam hak tanggungan, ketiga adalah hak tanggungan yang diatur dalam undang-undang No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang terakhir adalah jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun

¹ *Hutang Piutang Dalam Islam*, Poerwadarminto, [http. Kafeilmu.co](http://Kafeilmu.co), Jumat, 01/04/2011, 20.00 WIB

1999 tentang Jaminan Fidusia (yang selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia).²

Jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan para ahli adalah perluasan akibat banyak kekurangannya lembaga gadai (pand) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan di masyarakat.³

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Jaminan Fidusia, eksistensi fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konstruksi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik atas kepercayaan, atas benda atau barang-barang bergerak (milik debitor) kepada kreditor dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitor.⁴

Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak yang merupakan benda dalam persediaan (inventori), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor.⁵ Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia mulai meliputi juga kebendaan bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.⁶

Fiduciaire Eigendoms Over Dracht atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan

² Gunawan widjaja & Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, cet.III, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 5

³ H. Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, cet.I, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 57.

⁴ Gunawan widjaja & Ahmad Yani, Op.cit., h. 7

⁵ Penjelasan undang-undang No 42 tahun 1999 Jaminan Fidusia

⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Op.cit., h. 8

pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi benda bergerak yang dijaminakan masih dikuasai debitur karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari.

Undang-undang yang mengatur pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak adalah Gadai yang diatur buku II pasal 1150 sampai dengan 1160 KUHP. Apabila mencari pinjaman atau kredit dengan menggunakan jaminan gadai akan terbentur pada syarat In Bezit Stelling yaitu salah satu syarat dalam gadai yang mensyaratkan bahwa benda bergerak yang menjadi jaminan harus ditarik/berada dalam kekuasaan pemegang gadai/pemberi kredit.⁷

Dalam benda obyek jaminan ada beberapa macam benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak adalah benda dihitung masuk ke dalam golongan benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan / berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, contoh : perabot rumah, meja, mobil, motor.

Kedudukan benda yang dipakai sebagai obyek jaminan bagi kreditur mempunyai arti penting karena dengan benda jaminan ini bagi kreditur akan menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi segala kewajibannya atas sejumlah uang yang dipergunakan oleh debitur dan sekaligus dengan adanya benda jaminan, pemenuhan hak dan kewajiban serta adanya kepastian hukum dan segala perlindungan secara yuridis terpenuhi. Berbeda dengan gadai, benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tidak diserahkan kepada penerima fidusia

⁷ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2009, h. 203

atau kreditur, melainkan tetap dalam penguasaan fisik pemberi fidusia yaitu debitur atau pihak ketiga, karena jaminan ini bersifat kepercayaan. Tetapi penguasaan yuridis tetap berada di tangan penerima fidusia, karena terjadi pengalihan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia.⁸

Piutang sebagai benda obyek jaminan, hal ini juga memberikan keleluasaan baik bagi debitur maupun kreditur. Keuntungan bagi kreditur bisa mendapatkan modal bagi pengembangan usahanya dan bagi kreditur dengan adanya penyerahan piutang sebagai jaminan maka dengan sendirinya apabila debitur mengalami wanprestasi maka kreditur berhak atas semua piutang yang menjadi hak debitur dari pihak ketiga.⁹

Jaminan atas hutang ini juga memberi makna adanya perlindungan kreditur yang telah melepaskan sejumlah uangnya yang digunakan sebagai modal oleh debitur dan sekaligus memberi kepastian hukum akan kembalinya sejumlah uangnya yang digunakan oleh debitur kepada kreditur.

Dari berbagai pemaparan di atas mengenai definisi fidusia, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa fidusia merupakan perjanjian pengalihan hak penguasaan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang yang dijaminakan tetap dalam pengelolaan si pemilik (debitur), akan tetapi hak penguasaannya diberikan kepada si kreditur.

⁸ Sutarno, *Ibid*, h. 145

⁹ H. Salim, *Op.cit*, h. 95

Apabila debitur pemberi fidusia ingkar janji, kreditur penerima fidusia tidak dapat memiliki benda jaminan fidusia melainkan benda jaminan itu dijual untuk mengambil pelunasan piutangnya sesuai dengan hak prefensi yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur. Selain itu bahwa fidusia merupakan perjanjian yang memiliki sifat assessor (pelengkap dari perjanjian pokok) dan berkarakter kebendaan.¹⁰

Dalam permasalahan yang ada di Bank Mandiri selaku Kreditur untuk melakukan perjanjian kredit dengan Debitur yang objek jaminan fidusia musnah menjadi masalah yang ada di Bank Mandiri cabang Rungkut Sier. Apabila barang yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah, hilang, tidak dapat lagi diperdagangkan, sehingga barang itu tidak diketahui lagi apakah barang itu masih ada atau tidak maka perjanjian menjadi hapus asal musnahnya barang, hilangnya barang bukan kesalahan Debitur yang disebabkan keadaan memaksa dan sebelum Debitur lalai menyerahkan barangnya kepada Kreditur. Maka banyak permasalahan yang di hadapi oleh Bank Mandiri jika Debitur lepas dari tanggung jawab kewajiban membayar.

1.2 Perumusan Masalah

Bedasarkan kenyataan mengenai pentingnya perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang apabila objek jaminannya musnah sebagaimana terurai diatas, hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya

¹⁰Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, cet. I, h. 18

menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Bank Selaku Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Objek Jaminannya Musnah”, akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya musnah ?
- b. Bagaimana upaya hukum dari Bank yang dirugikan oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya musnah ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Bank selaku kreditur dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya musnah.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum dari Bank yang dirugikan oleh debitur dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia yang objek jaminannya musnah.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum perdata khususnya di bidang jaminan fidusia.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan kepada pemerintah Republik Indonesia dan dunia usaha pada umumnya dan perdagangan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan produksi secara optimal bagi lembaga pemegang fidusia untuk mengetahui sejauh mana Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak baik debitur maupun kreditur. Dan bagi kreditur pada khususnya, apabila debitur mengalami kemacetan sehingga kredit yang diberikan kepada debitur macet tidak terbayar. Perlindungan ini sangat perlu, sebab perlindungan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum yang efektif bagi semua pihak.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Dewasa ini istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai ada masyarakat yang jual beli barang dengan kreditan. Jual beli itu tidak dilakukan secara kontan atau tunai, tetapi dengan cara mengangsur. Selain dari itu banyak anggota masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan utang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar

lunas. Perjanjian kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang. Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat tercapai.¹¹

Menurut Pasal 1313 KUH Per menyatakan bahwa :

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

1.5.1.2 Asas-asas Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas penting dalam perjanjian antara lain:¹²

1) Asas kebebasan berkontrak

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Per yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

¹¹ Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1983, hal 4

¹² Patrik, *Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang 1986, Hal 3

Tujuan dari Pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya. Jadi berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja tentang apa saja dan perjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat perjanjian itu meliputi:

- a) Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang.
- b) Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam Undang-undang.¹³

2) Asas konsensualisme

Adalah suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

3) Asas itikad baik

¹³ *Ibid.*

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan dengan yang patut dalam masyarakat. mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat.¹⁴

4) Asas Pacta Sun Servanda

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam

¹⁴ *Ibid.*

perjanjian tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.¹⁵

5) Asas berlakunya suatu perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUHPer yang menyatakan: “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”

1.5.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini:¹⁶

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sepakat mengandung arti, bahwa apa yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hal.17

dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil balik, sehat jasmani dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehingga dapat membuat suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidak cakap menurut hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUHPerdato, yaitu :

- a. Orang yang belum dewasa;
- b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas, sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

1.5.2 Perjanjian Kredit

1.5.2.1 Pengertian Kredit

Kredit menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan selanjutnya disingkat UU Perbankan, menyatakan :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Pengertian kredit sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi seseorang yang telah menyatakan kepercayaan dari kreditur. Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran; apabila orang menyatakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.¹⁷

Apabila diartikan secara ekonomi, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Bisa 1 minggu 1 bulan bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian suatu

¹⁷ Sutarno, Op. cit., hal 92

penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang. Kredit berfungsi kooperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, sebagaimana pun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan.¹⁸

Menurut pasal 1 ayat (8) UU jaminan Fidusia menjelaskan tentang pengertian Kreditur yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Sedangkan Pengertian Debitur menurut pasal 1 ayat (9) UU Jaminan Fidusia adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang berkaitan Dengan Tanah, Kreditur adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu,

¹⁸ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2000, hlm. 1

sedangkan Pasal 1 ayat (3) Debitor adalah pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau B.W maksud isi dari kreditur atau Pihak berpiutang adalah Pihak yang berhak menuntut, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau Debitur.¹⁹

1.5.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Piutang menurut pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia) adalah hak untuk menerima pembayaran. Sedangkan pengertian Utang pasal 1 ayat (7) UU Jaminan Fidusia adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontingen.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.

Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan

¹⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT Intermasa, 1985, hal 123

prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

Dalam Buku III KUH Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Namun dengan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan isi dari perjanjian kredit sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Dengan disepakati dan ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak, maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah aksesori-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh

bank kepada nasabah kreditur. Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai kreditur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.²⁰

1.5.2.3 Jenis Perjanjian Kredit

Dilihat dari pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:

1. Perjanjian Kredit Di bawah tangan, yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang/Notaris.
Perjanjian Kredit Di bawah tangan ini terdiri dari:
 - a. Perjanjian Kredit Di bawah tangan biasa;
 - b. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (Waarmerking);
 - c. Perjanjian Kredit Di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).
2. Perjanjian Kredit Notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris.
Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang/Notaris)

²⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia di Tinjau Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 10 Tahun 1998, Undang – Undang No 23 Tahun 1999 Jo Undang – Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 71

1.5.2.4 Struktur Perjanjian Kredit

Suatu perjanjian kredit pada umumnya terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. Kepala/Judul
2. Komparisi
Komparisi adalah bagian dari perjanjian kredit yang memuat keterangan identitas para pihak.
3. Premis
Premis merupakan bagian dari akta yang berisi uraian yang memuat alasan-alasan atau dasar pertimbangan para pihak dalam membuat perjanjian kredit. Dalam premis dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstalasi fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan para pihak untuk mengadakan perjanjian kredit.
4. Batang Tubuh
Batang tubuh berisikan hal-hal yang disetujui oleh para pihak, berupa klausula-klausula, baik klausula hukum maupun klausula komersial yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit.
5. Kolom Tanda tangan (Signature Page)
Kolom tanda tangan berisikan tanda tangan para pihak pembuat perjanjian.²¹

1.5.2.5 Fungsi Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yang telah ditandatangani para pihak, baik yang berbentuk akta dibawah tangan (dibuat para pihak sendiri) atau dalam bentuk akta otentik (dibuat oleh dan dihadapan Notaris), mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi Kreditur dan Debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara Bank sebagai Kreditur dan Debitur. Hak Debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuannya dan kewajiban Debitur mengembalikan hutang tersebut baik pokok

²¹Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h.385

dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak Kreditur untuk mendapat pembayaran bunga dan kewajiban Kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada Debitur, dan Kreditur berhak menerima pembayaran kembali pokok dan bunga.

2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan, karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda-benda bergerak atau benda tidak bergerak milik Debitur atau milik pihak ketiga yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti biasa yang membuktikan adanya hutang Debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutoria atau tidak memberikan kekuasaan langsung kepada Bank atau Kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila Debitur tidak mampu melunasi hutangnya (wanprestasi).²²

1.5.3 Jaminan dan Fidusia

1.5.3.1 Pengertian Hukum Jaminan

Hukum jaminan tidak bisa dilepaskan dari masalah hukum kebendaan dan hukum perorangan dimana masalah tersebut masing-masing untuk jaminan kebendaan diatur dalam Buku II sedangkan jaminan perorangan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Jaminan secara harfiah selalu dikaitkan dengan pemberian kepercayaan kepada pihak lain atas sesuatu prestasi, jaminan juga

²² Sutarno, *op.cit.* h.129

bisa dikaitkan dengan masalah kepercayaan. Perumusan tentang jaminan juga dapat kita artikan sebagai kumpulan perangkat hukum yang mengatur mengatur tentang jaminan seorang kreditur terhadap seorang debitur.

1.5.3.2 Fidusia

Pengertian fidusia menurut Pasal 1 UU Jaminan Fidusia menyatakan :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* atau disebut FEO, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.²³

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur atau pemberi fidusia dan kreditur atau penerima fidusia merupakan hubungan hukum berdasar kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau

²³ H. Salim HS, *op.cit.*, h. 55

mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.²⁴

1.5.3.3 Sifat-sifat Jaminan Fidusia

Jamaina fidusia yang diatur dalam undang-undang Jaminan Fidusia mempunyai sifat-sifat sebagai berikut :

1. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *accessoir*
2. Jaminan Fidusia mempunyai sifat *droit de suite*
3. Jaminan Fidusia memberikan hak preferent
4. Jaminan Fidusia untuk menjamin utang yang telah ada atau akan ada
5. Jaminan Fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang
6. Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial
7. Jaminan Fidusia mempunyai sifat spesialisitas dan publisitas
8. Jaminan Fidusia berisi hak untuk melunasi utang

²⁴ Ignatius, *Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cetakan II, Semarang, 2001, hlm. 71

9. Jaminan Fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan klaim asuransi
10. Objek Jaminan Fidusia berupa benda-benda bergerak berwujud dan tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan serta benda-benda yang diperoleh di kemudian hari.²⁵

1.5.3.4 Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian /akta Jaminan Fidusia yaitu pemberi fidusia dan penerima fidusia.

Pemberi Fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Pemberi fidusia bisa Debitur sendiri atau pihak lain bukan Debitur.

Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pihak yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.²⁶

Jadi penerima fidusia adalah Kreditur (pemberi pinjaman), bisa Bank sebagai pemberi kredit atau orang-perorangan atau badan hukum yang memberi pinjaman. Penerima fidusia memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan utang yang diambil dari nilai obyek fidusia dengan cara menjual oleh Kreditur sendiri atau melalui pelelangan umum.

²⁵ Sutarno, *op. cit.* h. 206

²⁶ *Ibid* h. 212

1.5.3.5 Obyek Jaminan Fidusia

Yang dimaksud obyek Jaminan Fidusia adalah benda-benda apa yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Jaminan Fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia yaitu :

1. Benda bergerak berwujud, contohnya :
 - a. Kendaraan bermotor seperti mobil, bus, truk, sepeda motor, dan lain-lain;
 - b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah/bangunan pabrik;
 - c. Alat-alat inventaris kantor;
 - d. Perhiasan;
 - e. Persediaan barang atau inventory, stok barang, stok barang dagangan dengan daftar mutasi barang;
 - f. Kapal laut berukuran dibawah 20 m³;
 - g. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, lemari es, mesin jahit;
 - h. Alat-alat pertanian seperti traktor pembajak sawah, mesin penyedot air dan lain-lain.²⁷
2. Barang bergerak tidak berwujud, contohnya :
 - a. Wesel;
 - b. Sertifikat deposito;
 - c. Saham;
 - d. Obligasi;
 - e. Konosemen;
 - f. Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian;
 - g. Deposito berjangka.
3. Hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan.
4. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan.
5. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun

²⁷ *Ibid.*

di atas tanah hak pakai atas tanah negara (Undang-undang nomor 16 tahun 1985).

6. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.²⁸

1.5.4 Tujuan Tentang Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

1.5.5 Upaya Hukum Para Pihak

Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pihak kreditur apabila debitur wanprestasi berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang isinya adalah :

1. Pelaksanaantitle eksekutorial, yaitu bahwa dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata :
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

²⁸ *Ibid.*

Ketentuan ini merupakan ketentuan bersyarat artinya ketentuan tersebut baru berlaku apabila syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut dipenuhi, yaitu syarat bahwa debitur atau pemberi fidusia telah melakukan wanprestasi. Upaya hukum ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, khususnya bagi bank sebagai kreditur-penerima fidusia.

Seketika bank menerima objek jaminan fidusia, tidak peduli berapapun nilainya, sebaiknya bank langsung mendaftarkan perjanjian jaminan fidusia tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia. Sehingga bank mendapatkan perlindungan maksimal karena berkedudukan sebagai kreditur preferent.²⁹

Sehingga apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi, bank selaku kreditur preferent dapat menuntut haknya seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang. Lagipula, dana yang ada pada bank yang disalurkan kepada nasabah debitur adalah dana dari nasabah penyimpan dana, sehingga sudah menjadi kewajiban dari bank untuk melindungi dana tersebut yaitu dengan cara memastikan kedudukannya selaku kreditur preferent yang benar-benar dilindungi oleh Undang-Undang.

²⁹ *Pertindungan Hukum Bagi Bank Pada Pembebanan Jaminan Fidusia* Jayanti, Anggraini Vidya
www.library@unair.ac.id, Senin, 25/04/2011, 19.00 wib

1.5.6 Asuransi

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.³⁰

Asuransi atau dalam bahasa Belanda “Verzekering” yang berarti pertanggungan. Dalam Bab 9 pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek Van Koophandle, menyatakan bahwa :

“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri dengan seseorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didenda karena suatu peristiwa tak tentu.”

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyatakan :

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang

³⁰ *Pengertian Asuransi*; AryaBudiono www.Wikipedia bahasa Indonesia.co. id, Sabtu, 30/04/2011, 10.00 WIB.

timbul dan suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.”

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian adalah Penelitian hukum Yuridis Normatif, yaitu Tipe Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.³¹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Metode yang dilakukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis normative yaitu pendekatan dengan melihat peraturan perundang-undangan mengenai implementasi perlindungan hukum bagi Bank dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut ditetapkan.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang bersumber dari perundang-undangan atau dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

³¹ Ibrahim Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, PT. Bayu Media Publishing, Malang, 2010, hal.295

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki, KUHPer dan Perundang-undangan. Berdasarkan teori, maka bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan;
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian.

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (deherseende Leer), jurnal-jurnal hukum, yuresprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topic penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah :

1. Sutarno, SH, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.
2. H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia.
3. Mariam, Perjanjian Kredit Bank.

4. Purwahid, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian.

3) Bahan hukum tersier adalah Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan lain-lain. Adapun petunjuk yang dipakai dalam proposal skripsi ini terdiri dari : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Bahasa Hukum.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, serta bagaimana bahan hukum itu diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Untuk tujuan ini sering digunakan sistem kartu. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.

1.6.5 Metode Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SELAKU KREDITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH

2.1 Perjanjian Kredit Jaminan

Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUHPerdato tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdato. Beberapa Sarjana Hukum berpendapat bahwa perjanjian kredit dikuasai oleh ketentuan-ketentuan KUHPerdato Bab XIII buku III karena perjanjian kredit mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPerdato pasal 1754 yang berbunyi :

“Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.³²

Kredit diberikan oleh bank kepada debitur selalu ada persyaratannya, persyaratan itu adalah dengan memberikan jaminan terhadap kredit tersebut. Jaminan itu bisa dalam bentuk benda tertentu baik benda tak bergerak seperti tanah dan atau bangunan juga jaminan berupa benda bergerak seperti mobil, motor, mesin, deposito, saham dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bank dalam memberikan kredit tanpa meminta jaminan kepada debiturnya. Meskipun undang-

³² Sutarno, Op. cit., hal 96

undang perbankan tidak mensyaratkan kepada bank keharusan adanya jaminan dalam memberikan kredit namun dalam pelaksanaannya pemberian kredit selalu diikuti adanya jaminan berupa benda-benda tertentu.

Dalam perjanjian kredit harus diatur dan ditegaskan sejak kapan dan pelanggaran-pelanggaran apa saja yang mengakibatkan debitur dapat dikategorikan atau dinilai telah melakukan cidera janji. Ketentuan cidera janji merupakan ukuran yang sangat penting atau dasar hukum bagi kreditur untuk mengambil langkah atau tindakan kepada kreditur apakah memberikan somasi atau jika diperlukan melakukan tindakan hukum. Selama debitur tidak melakukan cidera janji atau tidak melanggar syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian kredit maka kreditur tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan debitur.³³

2.2 Sanksi Debitur Jika Wanprestasi

Jika debitur melakukan wanprestasi maka bank atau kreditur dapat memberikan sanksi atau hukuman berupa :

1. Membayar ganti rugi kepada bank misalnya denda.
2. Membatalkan perjanjian kredit dan ganti rugi.
3. Meminta perjanjian tetap dilaksanakan.
4. Meminta perjanjian tetap dilaksanakan walau terlambat.
5. Peralihan resiko dan membayar biaya perkara jika sampai di Pengadilan.

³³ *Ibid*, h. 118

Jaminan fidusia mempunyai sifat spesialitas dan publisitas. Sifat spesialitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai obyek jaminan fidusia. Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus diuraikan secara jelas dan rinci dengan cara mengidentifikasi benda jaminan tersebut, dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya dalam Akta Jaminan Fidusia.³⁴

Sifat publisitas adalah berupa pendaftaran Akta jaminan Fidusia yang merupakan akta pembebanan benda yang dibebani Jaminan Fidusia. Pendaftaran Akta jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia tempat dimana pemberi fidusia berkedudukan. Untuk benda-benda yang dibebani jaminan fidusia tetapi berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia tetap di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia di Indonesia dimana pemberi fidusia berkedudukan.³⁵

Kreditur sebagai penerima fidusia yang telah memiliki hak preferent tidak perlu khawatir seandainya pemberi fidusia akan mengalihkan seperti menjual, menyewakan, menjaminkan kembali atau mungkin diletakkan sita jaminan oleh pihak lain. Karena undang-undang memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang memiliki hak preferent dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dapat mengikuti benda itu berada (sifat *droit de suite*). Apabila hak preferent belum lahir kemudian jaminan fidusia itu dijual atau diletakkan sita jaminan oleh pihak lain maka pembebanan jaminan fidusia tidak

³⁴ *Ibid.*, h. 210

³⁵ *Ibid.*

dapat dilakukan akibatnya kreditur kehilangan hak preferent atas jaminan fidusia tersebut dan kreditur hanya memiliki hak konkuren atau hak berbagi dengan kreditur lainnya terhadap jaminan fidusia.³⁶

Dengan dilaksanakan pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka masyarakat dapat mengetahui bahwa suatu benda telah dibebani jaminan fidusia sehingga masyarakat akan berhati-hati untuk melakukan transaksi atas benda tersebut dan sekaligus memberikan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran benda yang telah dibebani jaminan fidusia ini untuk memenuhi asas publisitas seperti tercantum pada pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.³⁷

2.3 Perlindungan Bank Terhadap Objek Jaminan Fidusia Yang Musnah

Jika barang-barang jaminan perlu diasuransikan pada perusahaan asuransi maka perlu diatur ketentuan asuransi barang jaminan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Selama hutang debitur masih belum dilunasi seluruhnya, barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh debitur kepada Perusahaan Asuransi yang disetujui kreditur terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh kreditur.
- b. Dalam perjanjian asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari pihak Perusahaan

³⁶ *Ibid*,h. 280

³⁷ *Ibid*,h. 211

Asuransi, maka kreditur berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban debitur kepada kreditur (Banker's Clause).³⁸

Selama berlakunya perjanjian kredit, debitur wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Debitur harus segera memberitahukan kepada kreditur tentang adanya kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas jaminan yang diserahkan kepada kreditur.
- b. Debitur harus menyerahkan kepada kreditur laporan keuangan tahunan yang telah di audit oleh Akuntan Publik sesuai prinsip-prinsip akuntansi Indonesia.³⁹

Musnahnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila obyek jaminan fidusia berupa benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Apabila benda yang obyek jaminan fidusia tersebut musnah disebabkan misalnya karena kebakaran, hilang dan penyebab lainnya maka jaminan fidusia menjadi hapus. Kalau benda yang menjadi obyek jaminan fidusia di asuransikan kemudian benda tersebut musnah maka dengan musnahnya benda tersebut tidak menghapuskan klaim asuransi. Dengan demikian hak-hak asuransi dapat dipakai sebagai pengganti obyek jaminan fidusia yang musnah sebagai sumber pelunasan hutang debitur.

Perlu dipahami bahwa dengan musnahnya obyek jaminan fidusia tidak mengakibatkan hapusnya benda jaminan fidusia tidak mengakibatkan utangnya yang dijamin, debitur tetap mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, h 120

sesuai perjanjian kredit/ perjanjian utang. Hapusnya jaminan fidusia tidak mengakibatkan perjanjian pokok tetapi hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan hapusnya perjanjian jaminan fidusia.

Dengan adanya undang-undang tentang Fidusia maka dapat menjamin kepastian hukum untuk menjaminkan benda-benda bergerak yang bendanya masih dalam penguasaan pemilik jaminan, karena selama ini jaminan fidusia hanya berpegang pada yurisprudensi.

Guna melindungi kepentingan kreditur sebagai penerima fidusia maka undang-undang fidusia ini mengatur tentang pemberian sanksi bagi setiap orang atau debitur yang meugikan kreditur.

Dengan diundangkannya undang-undang jaminan fidusia maka memberikan kepastian hukum mengenai pemberian kredit dengan jaminan benda bergerak yang masih dalam penguasaan debitur atau pemberi fidusia. Undang-undang tentang jaminan fidusia tersebut sudah sangat lama ditunggu masyarakat perbankan bertujuan :

1. Memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai lembaga jaminan fidusia sehingga dapat membantu dunia usaha untuk mendapatkan dana dari perbankan dengan jaminan benda bergerak yang masih dikuasai debitur.
2. Menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kreditur dan debitur) dalam menyediakan pendanaan dengan jaminan fidusia.
3. Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia.⁴⁰

⁴⁰ Sutarno, Op.cit., hal 205

BAB III

UPAYA HUKUM DARI BANK YANG DIRUGIKAN OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG OBJEK JAMINANNYA MUSNAH

Sejak negeri ini mengalami krisis ekonomi dan moneter salah satunya berakibat pada kemerosotan di bidang usaha atau bisnis. Bisnis yang dilakukan para pengusaha besar, menengah atau kecil biasanya memanfaatkan kredit dari perbankan untuk memperkuat usaha bisnisnya. Tetapi dengan terjadinya krisis moneter, ekonomi, bisnis yang dilakukan para pengusaha banyak mengalami kegagalan dan dampaknya pinjaman kredit tidak dapat dikembalikan dan di perbankan menjadi kredit bermasalah atau non performing loan yang jumlahnya sangat besar.⁴¹

3.1. Non Litigasi

Non litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ciri utama penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah keputusannya berupa kesepakatan/ agreement. Upaya penyelesaian sengketa alternatif adalah dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, yaitu :

a. Negosiasi.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai negosiasi. Pada prinsipnya pengertian negosiasi adalah suatu proses dalam mana dua pihak yang saling bertentangan mencapai suatu kesepakatan umum melalui kompromi dan saling memberikan kelonggaran. Melalui Negosiasi para

⁴¹ *Ibid*, h.266

pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses peninjauan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan/melalui suatu situasi yang saling menguntungkan (win-win solution) dengan memberikan atau melepaskan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan asas timbal balik.

b. Mediasi.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai mediasi. Menurut Black's Law Dictionary mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal dimana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak mempunyai kesewenangan untuk menetapkan keputusan bagi para pihak. Mediator bersifat netral dan tidak memihak yang tugasnya membantu para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan mencapai kesepakatan. Dalam fungsinya mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan

c. Konsiliasi.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai konsiliasi. Menurut John Wade dari bond University Dispute Resolution Center, Australia "konsiliasi adalah suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian)."

d. Pendapat Ahli.

UU nomor 30/1999 tidak memberikan definisi mengenai penilaian ahli, menurut Hillary Astor dalam bukunya Dispute Resolution in Australia "penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa."⁴²

Untuk mengatasi kredit bermasalah dan menghindarkan kerugian yang besar di perbankan, Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit bermasalah. Khusus untuk masalah penyelesaian sengketa di bidang perbankan

⁴² *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian*, <http://www.ekomarwanto.com>, Kamis, 17/11/2011, 19.00 WIB

yang memakai jalur non litigasi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak bank adalah dengan memakai surat Direksi Bank Indonesia nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan restrukturisasi adalah :

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan.
- b. Untuk membantu memperingan kewajiban debitur sehingga mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk membayar hutangnya dan sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya.
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam prakteknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih.⁴³

Fasilitas atau kebijakan yang dapat digunakan untuk melakukan restrukturisasi kredit bermasalah menurut keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut diatas antara lain :⁴⁴

1. Penurunan Suku Bunga Kredit

Penurunan suku bunga kredit merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya bunga yang harus dibayar debitur setiap tanggal pembayaran menjadi lebih kecil dibanding suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya bunga kredit yang

⁴³ *Ibid*,h. 266

⁴⁴ *Ibid*,h. 267

ditetapkan dalam perjanjian kredit sebelumnya pertahun 20% diturunkan menjadi 15%. Dengan adanya keringanan suku bunga maka pembayaran bunga setiap bulannya menjadi lebih kecil sehingga pendapatan dari hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan dan mengembangkan usaha. Dengan demikian dalam jangka waktu tertentu sesuai perhitungan cash flow atas usaha debitur dapat diprediksi akan mampu menyelesaikan seluruh hutang dan usaha dapat berkembang kembali.⁴⁵

Akta-akta yang perlu dibuat atau diperbarui berkenaan dengan terjadinya penurunan suku bunga yaitu perlu dilakukan amandemen atau addendum terhadap perjanjian kredit. Pasal yang semula mengatur tentang besarnya suku bunga kredit perlu diadakan perubahan atau amandemen untuk disesuaikan dengan besarnya penurunan suku bunga kredit. Mungkin saja terjadi, dengan penurunan suku bunga kredit, kreditur atau bank memberikan syarat tambahan atau merubah syarat yang telah ada. Oleh karena itu syarat tambahan atau merubah syarat yang sudah ada perlu dituangkan dalam amandemen atau addendum perjanjian kredit.

Amandemen atau addendum merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kredit lama. Semua ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit yang tidak diubah tetap berlaku dan yang telah dirubah dinyatakan tidak berlaku lagi. Penurunan suku bunga tidak merubah

⁴⁵ *Ibid.*

perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Penurunan suku bunga hanya merubah ketentuan dan syarat dalam perjanjian kredit. Bentuk addendum perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak. Biasanya bank/ kreditur akan mempersiapkan addendum perjanjian kredit tersebut.⁴⁶

2. Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit, tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit lama kelamaan menjadi menumpuk yang jumlahnya menyamai hutang pokok.⁴⁷ Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini usaha yang dilakukan debitur tidak berjalan sesuai rencana bahkan gagal sehingga pendapatan usaha merosot dan akibatnya tidak mampu memenuhi kewajiban membayar bunga kepada kreditur setiap bulannya.

Pengurangan tunggakan bunga tidak mengakibatkan perubahan akta perjanjian kredit karena yang dikurangi adalah besarnya tunggakan bunga yang seharusnya dibayar debitur. Bukti adanya pengurangan tunggakan bunga, bank cukup mengeluarkan surat yang ditujukan kepada debitur yang menegaskan bahwa besarnya tunggakan bunga

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h.268

yang harus dibayar dikurangi sehingga lebih kecil dari perhitungan sebenarnya berdasarkan perjanjian kredit.

3. Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Sejumlah pinjaman uang yang diberikan kreditur /bank kepada debitur inilah yang disebut pokok kredit. Misalnya bank meminjamkan uang kepada debitur sebesar satu milyar rupiah dan debitur telah menarik seluruh pinjaman ini maka satu milyar rupiah inilah yang disebut pokok kredit yang harus dibayar kembali oleh debitur sesuai jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Pembayaran pokok kredit dapat ⁴⁸dilakukan sebagian-sebagian setiap bulan bebarengan dengan pembayaran bunga atau sekaligus di akhir jangka waktu kredit. Hal ini sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Pengurangan tunggakan pokok merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan bank kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena aset bank yang berupa hutang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank.

⁴⁸ *Ibid.*

4. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya yang seharusnya dikembalikan selambat-lambatnya pada bulan Januari 2003 diperpanjang menjadi Januari 2005. Dengan memperpanjang jangka waktu kredit maka kualitas kredit debitur digolongkan menjadi *performing loan* (tidak bermasalah) dan dengan perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang yang jatuh⁴⁹ tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh hutangnya.

5. Penambahan Fasilitas Kredit

Kadang-kadang menjadidi tanda tanyaanya kredit macet justru diberikan penambahan kredit sehingga hutang menjadi bertambah besar. Apakah debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Inilah strategi penyelamatan kredit. Penambahan kredit diharapkan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan hutang lama dan tambahan kreditr baru. Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang

⁴⁹ *Ibid*, h. 269

cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usahadebitur karena debitur menanggung hutang lama dan hutang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.⁵⁰

6. Pengambil Alihan Agunan/Aset debitur

Pengambil alihan asset debitur dalam hukum dapat disebut kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank /kreditur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut di kompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik/aset bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil alih aset debitur ini juga dapat disebut set off.

Untuk melakukan pengambil-alihan atau kompensasi atas jaminan kredit diperlukan syarat-syarat atau kriteria agar nantinya dalam waktu satu tahun agunan yang diambil alih segera dapat dijual kembali sehingga menjadi aktiva yang produktif kembali. Syarat-syarat atau kriteria yang diperlukan antara lain :

⁵⁰ *ibid*,h. 270

- a. Agunan yang akan diambil alih atau dikompensasikan dengan tunggakan kredit tersebut strategis sehingga sewaktu-waktu bank dengan mudah untuk menjual kembali atau dikerjasamakan dengan pihak lain.
- b. Dokumen atau surat-surat benda yang menjadi agunan tersebut lengkap dan sah menurut hukum.
- c. Nilai agunan yang diambil alih lebih besar dari tunggakan kredit yang dikompensasi.⁵¹

7. Jaminan Kredit Dibeli oleh Bank

Untuk menyelamatkan kredit bank dapat membeli agunan melalui penjualan umum atau lelang. Undang-undang melarang bank memiliki langsung agunan tersebut. Janji yang diadakan untuk memiliki agunan jika debitur cidera janji batal demi hukum. Pasal 6 huruf k, undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan memberikan landasan hukum yang memungkinkan bank untuk membeli agunan melalui pelelangan agunan, semua atau sebagian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.⁵²

Fungsi pasal 6 huruf k Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagai salah satu sarana hukum dalam penyelesaian kredit macet perbankan. Prinsip yang terkandung dalam pasal tersebut yaitu :

- a. Pembelian agunan melalui pelelangan oleh bank sebagai kreditur dilakukan dalam hal debitur cidera janji.

⁵¹ *Ibid*, h. 271

⁵² *Ibid*, h. 272

- b. Agunan yang dibeli harus segera dijual kembali agar memperoleh dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank.
- c. Agunan yang dibeli tidak menjadi aset bank.

8. Konversi Kredit Menjadi Modal Sementara dan Pemilikan saham

Konversi kredit menjadi modal dalam perusahaan debitur merupakan salah satu bentuk restrukturisasi kredit. Konversi kredit menjadi modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut Debt Equity Swap. Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan hutang debitur menjadi lunas. Berapa jumlah saham yang dimiliki bank tergantung hasil penilaian berapa nilai saham yang disepakati.⁵³

9. Alih Manajemen

Bila hasil analisa terhadap proyek yang dibiayai dengan kredit menunjukkan adanya prospek yang dapat menghasilkan sumber dana namun manajemen tidak mampu maka bank dapat mengganti pengurus pada perusahaan debitur tersebut. Selanjutnya bank /kreditur dapat mengangkat atau menunjuk manajemen baru yang mampu mengelola perusahaan debitur. Namun untuk mengganti manajemen tidaklah mudah

⁵³ *Ibid*, h. 273

karena perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas penggantian pengurus merupakan hak pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS).

Kreditur atau bank bukanlah pemegang saham sehingga sulit untuk mengganti pengurus perusahaan debitur tersebut. Bank hanya dapat menganjurkan kepada pemegang saham agar mengganti pengurus baru seperti yang dikehendaki bank. Apabila para pemegang saham tidak bersedia mengganti orang-orang yang ditunjuk bank akibatnya penggantian manajemen tidak bisa terlaksana. Oleh karena itu dalam penyelamatan kredit melalui restrukturisasi ini etiked baik dan bantuan dari debitur sangat diperlukan.⁵⁴

10. Pengambil Alihan Pengelolaan Proyek

Sering terjadi debitur gagal dalam mengelola proyek yang dibiayai dengan kredit sehingga proyek tidak menghasilkan pendapatan sebagai sumber pengembalian kredit, padahal satu-satunya sumber pengembalian kredit pada umumnya adalah keberhasilan proyek itu. Kegagalan mengelola proyek mungkin disebabkan ada penyimpangan dalam penggunaan kredit atau manajemen debitur tidak memiliki

⁵⁴ *Ibid*, h. 275

kemampuan atau profesionalisme dalam mengelola proyek yang dibiayai dengan kredit.⁵⁵

11. NOVASI (Pembaharuan Hutang)

Sewaktu membahas sebab-sebab berakhirnya perjanjian telah diuraikan mengenai novasi sebagai salah satu sebab atau cara mengakhiri perjanjian antara kreditur dan debitur. Novasi juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyelamatan kredit bermasalah dengan cara mengalihkan debitur lama kepada debitur baru berikut aset yang menjadi jaminan kredit yang disebut Novasi Subyektif Aktif atau mengubah isi atau obyek perjanjian sedangkan posisi kreditur dan debitur tidak berubah yang disebut Novasi Obyektif.⁵⁶

Novasi atau pembaruan utang adalah suatu perjanjian baru yang menghapuskan perjanjian lama dan pada saat yang sama memunculkan perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. Novasi diatur dalam pasal 1423 dan 1424 KUHP. Seperti diuraikan dalam pasal tersebut dan telah disinggung diatas novasi ada 3 jenis novasi yaitu novasi subyektif pasif, novasi subyektif aktif, dan novasi obyektif. Dari tiga jenis novasi tersebut semuanya dapat digunakan untuk melakukan penyelamatan kredit. Mengenai jenis mana yang dipilih tergantung kesepakatan kreditur dan debitur berdasarkan analisa dan peluang-peluang yang mungkin

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, h. 281

dapat dilakukan untuk melakukan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi.

12. Subrogasi

Subrogasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara untuk penyelamatan kredit. Subrogasi adalah pengantian hak-hak si berpiutang atau kreditur oleh seorang pihak ketiga yang telah membayar atas hutang si berhutang/debitur kepada si berpiutang/kreditur. Jadi seorang pihak ketiga yang telah membayar utang si berhutang tersebut demi hukum muncul sebagai kreditur baru yang menggantikan kedudukan kreditur/ si berpiutang lama terhadap debitur/si berhutang. Karena hutang telah dibayar oleh seorang pihak ketiga tersebut maka perjanjian hutang menjadi hapus tetapi pada saat yang sama perjanjian hutang hidup lagi dengan seorang pihak ketiga sebagai pengganti kreditur lama. Kreditur baru dapat menagih kepada debitur dan memperoleh hak-hak ikutannya yang berupa jaminan-jaminan kredit tersebut.⁵⁷

13. CESSIE

Penyelamatan kredit melalui cessie ini inisiatif dan prakarsa datang dari kreditur sehingga kreditur harus mencari kreditur yang bersedia dan membeli piutang dengan pembayaran lunas sekaligus,

⁵⁷ *Ibid*, h. 288

meneliti nilai jaminan harus lebih besar dari piutang yang akan dijual, jaminan marketable, strategis, pengikatan jaminan kuat secara hukum dan dokumen lengkap. Kreditur harus menyiapkan akta-akta yang perlu dibuat dalam melakukan penyelamatan kredit melalui cessie ini yaitu :

- a. Akta jual beli piutang antara kreditur lama dan kreditur baru yang nilai sesuai kesepakatan kreditur lama dan kreditur baru. Tujuan seorang yang membeli piutang macet tentu bertujuan untuk mencari keuntungan dengan membandingkan antara besarnya piutang yang dibeli dengan tagihan kepada debiturnya dan nilai jaminan. Berdasarkan kriteria itu piutang yang dibeli tentu lebih rendah dari piutang yang dapat ditagih kepada debitur. Bentuk akta jual beli bisa dibuat dibawah tangan atau dengan akta otentik.
- b. Akta cessie merupakan penyerahan piutang yang dialihkan. Akta ini perlu dibuat berkaitan dengan aturan hukum mengenai penyerahan barang. Menurut hukum perdata barat yang masih digunakan sebagai dasar perjanjian jual beli hanya bersifat “ obligatoir“ artinya perjanjian jual beli baru menimbulkan hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan hak milik barangnya kepada pembeli dan mempunyai hak untuk meminta harga pembayaran. Pembeli berkewajiban membayar harga barang dan berhak menerima. Perjanjian jual beli menurut hukum perdata barat yang kita anut belum memindahkan hak milik. Untuk memindahkan hak milik masih harus ada perbuatan hukum lagi yang disebut leveringa / penyerahan (transfer of ownership). Penyerahan tergantung barangnya. Penyerahan barang tidak berwujud seperti piutang/tagihan ini penyerahannya melalui cessie perlu dibuat akta cessie. Bentuk akta cessie bisa dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.
- c. Akta-akta perjanjian kredit dan pengikatan jaminan yang ada tetap berlaku sah dan mengikat antara kreditur baru dan debitur. Hak dan kewajiban kreditur lama beralih sepenuhnya kepada kreditur baru seperti tercantum dalam perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sehingga kreditur baru berhak menagih kepada debitur. Kreditur berkewajiban memberitahukan kepada debitur secara tertulis bahwa piutang telah dialihkan kepada kreditur baru sehingga debitur dalam menyelesaikan hutangnya berhubungan dengan kreditur baru.⁵⁸

⁵⁸ *ibid*,h. 290

14. Debitur Menjual Sendiri Barang Jaminan

Kreditur dapat meminta debitur melakukan penjualan jaminan kredit. Karena dengan cara ini dapat menghemat waktu, biaya dan hasilnya akan lebih baik daripada lelang. Secara teori penjualan jaminan melalui lelang bertujuan untuk memperoleh harga yang tinggi tetapi dalam pelaksanaannya justru sebaliknya biaya mahal, memerlukan waktu lama untuk menuju lelang dan hasil penjualan lelang rendah.

Bank sebagai kreditur harus membantu debitur dalam melakukan penjualan jaminan tersebut, dengan cara mencari calon pembeli dan kalau perlu ikut berunding dengan calon pembeli untuk memperlancar penjualan tersebut.⁵⁹

15. Penghapusan Piutang

Penghapusan piutang adalah pembebasan hutang debitur oleh bank, baik seluruh atau sebagian atau karena hutangnya telah kadaluwarsa menurut hukum. Penghapusan piutang menurut KUHPer diatur pada :

- a. Pasal 1967 : Pasal ini mengandung pengertian bahwa bank melakukan penghapusan hutang debitur baik seluruhnya atau sebagian setelah lewat waktu 30 tahun dan selama waktu tersebut bank tidak pernah melakukan penagihan sejak tanggal perjanjian kredit.
- b. Pasal 1381 : Pasal ini mengandung pengertian bahwa penghapusan piutang terjadi karena pembebasan hutang oleh bank sebagai kreditur

⁵⁹ *Ibid*, h. 292

(kwijtschelding). Pembebasan ini terjadi karena bank memberikan potongan (diskont).⁶⁰

3.2 Litigasi

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa yang litigasi, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank adalah upaya hukum biasa dan luar biasa yaitu :

- a. Upaya hukum banding, menurut pasal 233 KUHAP
- b. Upaya hukum kasasi, menurut pasal 244 dan pasal 259 KUHAP
- c. Upaya hukum luar biasa yaitu PK atau disebut dengan Peninjauan Kembali, menurut pasal 263 KUHAP

Berbeda dengan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi atau non litigasi, penyelamatan kredit melalui lembaga-lembaga hukum akan terjadi pemutusan hubungan antara kreditur dan debitur. Penekanan penyelamatan kredit melalui lembaga hukum lebih ditujukan pada eksekusi jaminan yang hasilnya untuk melunasi hutang debitur. Oleh karena itu kondisi barang jaminan harus strategis dan marketable didukung dengan dokumen yang lengkap.⁶¹ Penyelamatan kredit melalui lembaga hukum terpaksa dilakukan karena penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan karena syarat-syarat restrukturisasi tidak bisa dipenuhi debitur. Langkah seperti ini dalam bahasa penyelamatan kredit disebut Second Way Out.

⁶⁰ *Ibid*, h. 293

⁶¹ *Ibid*, h. 295

3.2 Upaya Bank Untuk Penyelamatan Kredit Melalui Lembaga-lembaga Hukum

Langkah-langkah penyelamatan kredit (second Way Out) melalui lembaga-lembaga hukum ini antara lain meliputi :

1. Somasi

Somasi menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada debitur untuk segera membayar/ menyelesaikan hutangnya kepada kreditur. Somasi melalui pengadilan ini penting untuk menambah memperkuat pembuktian bahwa debitur telah cidera janji. Namun untuk menentukan debitur cidera janji tidak harus ditentukan adanya somasi dari Pengadilan. Dengan lewatnya waktu pembayaran dari jadwal yang ditentukan tetapi debitur belum melakukan pembayaran juga bisa dikualifikasikan debitur telah cidera janji.

2. Gugatan Kepada Debitur

Pada dasarnya setiap penyelesaian kredit yang disebabkan debitur macet/ cidera janji dan penyelamatan melalui restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi telah dilakukan tetapi mengalami kegagalan dalam implementasinya maka penyelesaian yang harus ditempuh kreditur menurut hukum, kreditur harus mengajukan gugatan perdata kepada debitur atau melakukan eksekusi sesuai peraturan hukum atas jaminan-jaminan jika kreditur memiliki dasar hukum untuk melakukan eksekusi. Kreditur tidak dibenarkan memaksa, menekan, menakut-nakuti, mengancam, menciderai secara fisik atau melakukan kekerasan atau tindakan intimidasi lainnya kepada debitur agar membayar hutangnya.

Hak-hak yang dimiliki kreditur/ Bank untuk memperoleh kembali haknya yang berupa pengembalian hutang dari debitur harus disalurkan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan meminta perlindungan hukum dari pengadilan yang isinya memberikan hak kepada kreditur untuk memaksa debitur melunasi hutangnya. Untuk memperoleh putusan dari Pengadilan kreditur harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada debitur atau pihak lain yang turut bertanggung jawab atas hutang debitur melalui Pengadilan Negeri.

3. Eksekusi Putusan Pengadilan *Uitvoer Bij Vooraad*

Uitvoer Bij Vooraad atau dalam bahasa Indonesia diartikan “ pelaksanaan putusan terlebih dahulu “ artinya suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan eksekusinya meskipun keputusan itu belum mempunyai keputusan hukum tetap karena Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan atau banding atau kasasi. Suatu putusan pengadilan memiliki kekuatan “ pelaksanaan putusan terlebih dahulu “ apabila majelis hakim yang mengadili perkara itu mengabulkan tuntutan Penggugat agar putusan Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dikabulkannya pelaksanaan keputusan

terlebih dahulu tercermin dari amar putusan Pengadilan Negeri. Misalnya majelis hakim Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata mengabulkan gugatan Penggugat dan dalam amar keputusan tersebut juga mengabulkan salah satu petitumnya yakni keputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dengan keputusan seperti ini Penggugat yang memenangkan perkara itu dapat menggunakan keputusan tersebut untuk melakukan eksekusi harta Tergugat meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi.

4. Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang

Penyelamatan kredit melalui gugatan ke Pengadilan yang bertujuan untuk memperoleh keputusan Pengadilan yang pasti memerlukan waktu yang cukup lama karena terikat pada system dan prosedur hukum acara perdata yaitu melalui persidangan berkali-kali sesuai acaranya dan belum lagi jika debitur sebagai Tergugat mengajukan banding dan kasasi setelah mendapat keputusan Pengadilan. Menyadari bahwa penagihan piutang atau penyelamatan kredit melalui prosedur gugatan memerlukan waktu lama maka pembentuk undang-undang memberikan pengecualian dari prosedur penagihan piutang melalui gugatan. Dengan adanya pengecualian yang diciptakan pembentuk undang-undang tersebut maka dalam menyelesaikan debitur yang wanprestasi kreditur tidak perlu menempuh melalui gugatan perdata kepada debitur tetapi dapat langsung mengeksekusi jaminan kredit berdasar grosse akta pengakuan hutang.

5. Eksekusi Hak Tanggungan/ Grosse Akta Hipotik

Grosse akta hipotik memiliki irah-irah dengan kata-kata “ Atas Nama Keadilan “ yang sekarang irah-irah telah diganti dengan kata-kata “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ irah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 224 HIR/ 258 RGB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan Pengadilan yang tetap. Ini merupakan keputusan pembentuk undang-undang yang merupakan pengecualian dari penyelesaian prosedur penagihan hutang melalui gugatan yang memerlukan waktu, tenaga lama dan biaya yang tidak sedikit. Dengan memiliki grosse akta hipotik ini tidak perlu mengajukan gugatan kepada debitur supaya membayar hutangnya tetapi dapat mengajukan eksekusi langsung Atas jaminan yang telah dibebani hipotik itu. Eksekusi jaminan diajukan melalui Pengadilan Negeri yang meliputi wilayah hukum jaminan itu berada dengan mengajukan permohonan eksekusi.⁶²

⁶² *Ibid*, h.296

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang perlindungan hukum kepada Bank terhadap Jaminan Fidusia yang objek jaminannya musnah bentuknya adalah barang-barang jaminan atau objek Jaminan Fidusia wajib diasuransikan oleh debitur kepada perusahaan Asuransi yang disetujui kreditur terhadap resiko barang-barang jaminan atau objek jaminan.

Untuk pembahasan tentang upaya hukum oleh Bank selaku kreditur mengenai Jaminan Fidusia yang objek jaminannya itu musnah adalah bisa ditempuh dengan 2 cara yaitu, litigasi dan non litigasi. Yang litigasi sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 233 upaya hukum banding, pasal 259 upaya hukum kasasi, dan pasal 263 upaya hukum luar biasa yaitu PK atau disebut dengan Peninjauan Kembali. Dan yang non litigasi berdasarkan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.

4.2 Saran

1. Perlindungan hukum terhadap Bank selaku kreditur memberikan penjelasan kepada debitur agar barang atau obyek jaminan Fidusia wajib diasuransikan

oleh debitur kepada perusahaan asuransi terhadap resiko pada barang atau obyek jaminan fidusia.

2. Tindakan Bank selaku kreditur dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah maka seharusnya diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat segera mengambil tindakan hukum jika sudah tidak ada jalan lain penyelesaian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

BadrulZaman Mariam Darus, Perjanjian Kredit Bank, Bandung, Alumni, 1983.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Budi Untung.H, Kredit Perbankan Indonesia, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2000.

Djumhana SH, Hukum perbankan di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimanas telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : PT. Bayu Media Publishing, 2010.

Patrik Purwahid, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1986.

R. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa ,Jakarta, 1984.

Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada,2004.

SUBEKTI, S.H, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT Intermasa, 1985

Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung, Alfabeta, 2009.

Widyadharma Ignatius Ridwan, Pedoman Praktis Hukum Jaminan Fidusia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Cetakan II, 2001

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Undang-undang nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Alfabeta, Bandung, 2009

Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, CV. Eko Jaya, Jakarta, 1998

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Media Center, Surabaya, 2006

WEBSITE

Hutang Piutang dalam Islam, [http Kafeilmu. co](http://Kafeilmu.co), diakses pada hari Jumat, 01/14/2011 20.00 WIB

Definisi Perlindungan Hukum, <http://prasxo.wordpress.com>, diakses pada hari Senin, 18/04/2011, 7.00 WIB

Perlindungan Hukum Bagi Bank pada Pembebanan Jaminan Fidusia, www.library@unair.ac.id, diakses pada hari Senin, 25/04/2011, 19.00 WIB

Ensiklopedia bebas Pengertian Asuransi, [www.Wikipedia bahasa Indonesia.co.id](http://www.Wikipedia.bahasaIndonesia.co.id), diakses pada hari Sabtu, 30/04/2011, 10.00 WIB

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, <http://www.ekomarwanto.com>, diakses pada hari Kamis, 17/11/2011, 19.00 WIB